
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN PERIODE 2019-2021

Aman Aston Sofian Fau

Mahasiswa Prodi Manajemen

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nias Raya

(astonfau02@gmail.com)

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan periode tahun 2019-2021 dengan menggunakan metode analisis rasio keuangan daerah dan diagram analisis fishbone. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2019-2021 masih tergolong masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena rendahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan memaksimalkan pendapatan asli daerahnya, kurangnya ketertarikan para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Nias Selatan, dan alokasi belanja operasional lebih tinggi dibandingkan belanja modal daerah sehingga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan perlu meningkatkan kinerjanya terutama pada pengelolaan pendapatan asli daerah berupa sosialisasi pajak masyarakat, serta meningkatkan ketersediaan sarana prasarana dengan memperhatikan alokasi belanja keuangan Pemerintah Daerah, dan perlunya keterlibatan pihak-pihak swasta (investor) dalam meningkatkan potensi penerimaan daerah, serta pemerintah harus lebih solusional dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan masalah ekonomi yang dihadapi daerah.

Kata Kunci: *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Kemandirian, Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Aktivitas, dan Derajat Desentralisasi.*

Abstract

The purpose of this study was to determine the financial performance of the South Nias Regency regional government for the 2019-2021 period using the regional financial ratio analysis method and fishbone analysis diagrams. The type of research used is qualitative research. The research results obtained show that the financial performance of the South Nias Regency regional government from 2019-2021 is still classified as very low. This is due to the low ability of the Regional Government in planning and maximizing their own regional income, the lack of interest of investors to invest in South Nias Regency, and the allocation of operational expenditure is higher than regional capital expenditure, thus affecting the performance of the Regional Government. To overcome this, the Regional Government of South Nias Regency needs to improve its performance, especially in managing local revenue in the form of community tax socialization, as well as increasing the availability of infrastructure by taking into account the allocation of Regional Government financial spending, and the need for the involvement of private parties (investors) in

increasing the potential regional revenues, as well as the government must be more solution-oriented in setting policies and solving economic problems faced by the regions.

Keywords: *Local Government Financial Performance, Independence, Effectiveness of Local Own Revenue, Activities, and Degree of Decentralization*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah guna mencapai tujuan pembangunan secara merata dimana masyarakat juga ikut berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita dari negara. Salah satu upaya atau kebijakan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan adalah dengan menerapkan kebijakan Otonomi Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah disusun dan ditetapkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Menurut UU RI nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sehingga melalui kebijakan Otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang bagi setiap pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur segala keperluan daerahnya sendiri, sesuai dengan konsep Desentralisasi.

Pengelolaan keuangan daerah menjadi kunci penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Menurut (Wau,

Wati, and Fau 2022, 35) Keuangan daerah mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pemerintah dan kegiatan pembangunan oleh pelayanan masyarakat di daerah. Yang artinya keuangan daerah merupakan penentu utama berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah suatu daerah. Hal ini menunjukkan perlunya pengukuran kinerja keuangan pemerintah guna menilai dan mengetahui tingkat penyelenggaraan pemerintah daerah.

Kabupaten Nias selatan adalah sebuah kabupaten baru di Sumatera Utara yang berdiri dan disahkan pada tahun 2003 dan ikut serta menerapkan sistem otonomi daerah, sehingga kabupaten Nias Selatan diberi wewenang secara legal untuk mandiri dan mampu mengatur segala penyelenggaraan yang diwenangi oleh Pemerintah Daerah Nias Selatan. Dengan demikian, pemerintah kabupaten Nias Selatan diharapkan untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2019, kabupaten Nias Selatan ikut mengalami pelemahan dalam bidang ekonomi, yang pastinya mempengaruhi tingkat pendapatan dan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan sebagai dampak dari penyebaran virus covid-19.

Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat sebuah topik " **Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah**

Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun 2019-2021.”

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keuangan daerah menjadi faktor utama penentu berhasil tidaknya penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan.
2. Pandemi Covid-19 mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah kabupaten Nias Selatan.
3. Perlu adanya pengukuran kinerja keuangan untuk menilai kemampuan penyelenggaraan pemerintah daerah.

1. Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan melimpahkan wewenang kepada setiap pemerintah daerah untuk mengurus sendiri urusan daerahnya. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya menurut (Faisal and Nasution 2016) “Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang berlaku”. Menurut (Moonti 2017) “Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perataan

pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya”.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kebebasan dan wewenang kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus segala keperluan dan pemerintahannya secara mandiri.

2. Konsep Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan adalah kemampuan atau pencapaian-pencapaian keuangan daerah selama periode tertentu yang dilihat berdasarkan laporan keuangan daerah. Selaras dengan pendapat (Fahmi 2017, 2) “pengertian Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan aturan”. Selanjutnya Menurut (Mardiasmo 2018, 151) “Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangundangan”. Dan menurut (Putra 2018, 50) “kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu bentuk penilaian dengan asas manfaat dan efisiensi dalam penggunaan anggaran keuangan”.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah adalah penilaian pencapaian atau keberhasilan suatu daerah atas kriteria atau target yang telah ditetapkan dari sisi keuangan.

3. Konsep Analisis Rasio Keuangan Daerah

Analisis rasio keuangan adalah upaya untuk menilai pencapaian-pencapaian keuangan daerah dengan membandingkan pos-pos keuangan daerah. Sesuai dengan pendapat Warsidi dan Bambang dalam buku (Fahmi 2017, 44), "analisis rasio keuangan merupakan instrumen analisis prestasi suatu Perusahaan yang menjelaskan berbagai hubungan dan indikator keuangan, yang di tujuan untuk menunjukkan perubahan dalam kondisi keuangan atau prestasi operasi dimasa lalu dan membantu menggambarkan *trend* pola perubahan tersebut, untuk kemudian menunjukkan risiko dan peluang yang melekat pada perusahaan yang bersangkutan". Menurut (Ulum 2012, 30) "Analisis keuangan adalah usaha mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia". Dan menurut (Sari, Asaari, and Hidayah 2021) "Analisis rasio keuangan pemerintah daerah adalah membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan yang mengetahui posisi keuangan suatu daerah untuk menilai kinerja keuangan dalam suatu periode tertentu".

Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis rasio keuangan daerah adalah suatu instrumen untuk menganalisis pencapaian dan prestasi pemerintah daerah dengan

membandingkan angka-angka yang termuat dalam laporan keuangan daerah.

Dalam organisasi pemerintah untuk mengukur kinerja keuangan ada beberapa ukuran kinerja, yaitu sebagai berikut (Wau, Wati, and Fau 2022, 36) :

- a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, semakin rendah, demikian pula sebaliknya.
- b. Rasio Efektivitas Pendapatan Daerah
Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal sebesar 1 atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Ulum 2012, 32).
- c. Rasio Aktivitas (Keserasian)
Rasio keserasian adalah rasio yang menggambarkan bagaimana pemerintahan daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja operasi dan belanja modal secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja operasi berarti persentase belanja modal yang digunakan untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Zuhri and Soleh 2014).
- d. Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio derajat desentralisasi adalah rasio yang menggambarkan seberapa besar kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatannya yang diukur dengan membandingkan jumlah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD) (Zukhri 2020).

B. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono 2012, 14).

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang telah ada sebelumnya dan dapat digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Data pada penelitian ini bersumber dari Kantor Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Dan objek penelitian adalah masalah yang akan diteliti. Dan Objek pada Penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun periode 2019-2021.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dan metode dokumentasi. Metode Studi Literatur merupakan kegiatan yang diwajibkan

dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Teknik Analisis Rasio Dan Teknik Analisis Fishbone.

1. Teknik analisis Rasio Keuangan adalah alat yang dapat digunakan dalam mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan suatu badan dengan membandingkan beberapa pos-pos yang relevan di dalamnya.

Jenis- jenis rasio dan skala interval penilaian tingkat kinerja atas rasio keuangan :

- a) Rasio Kemandirian

Rumus yang digunakan untuk menghitung rasio kemandirian (Halim 2014, 267) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Untuk menilai tingkat kemandirian suatu daerah, dapat dinilai melalui tingkat persentase yang telah disajikan di bawah ini .

Tabel 1. Tingkat persentase Kemandirian Daerah

| Kemampuan Keuangan | Kemandirian (%) |
|--------------------|-----------------|
| Rendah Sekali | 0-25 |
| Rendah | 25-50 |
| Sedang | 50-75 |
| Tinggi | 75-100 |

Sumber : Kepmendagri No.

690.900.327/1996

- b) Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio Efektivitas dapat dirumuskan Sebagai berikut (Halim 2014, 267):

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Anggaran PAD}} \times 100\%$$

Tabel 2. Skala interval tingkat efektivitas PAD

| Kriteria Efektivas | Efektivitas (%) |
|--------------------|-----------------|
| Sangat efektif | >100 |
| Efektif | >90-100 |
| Cukup Efektif | >80-90 |
| Kurang Efektif | >60-80 |
| Tidak Efektif | ≤60 |

Sumber : Kepmendagri No.

690.900.327/1996

c) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan belanja daerah antara belanja operasional dan belanja modal. Semakin besar belanja modal di bandingkan belanja operasional maka menggambarkan tingginya aktivitas daerah dalam menambah jumlah aset daerah, dan sebaliknya. Rasio Aktivitas dapat dirumuskan sebagai berikut (Halim 2007, 236):

1) Rasio Belanja Operasi

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Total Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

2) Rasio Belanja Modal

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Total Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil (Fathah 2017).

d) Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi dapat di hitung menggunakan rumus:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel.3. Skala Interval Tingkat Penyelenggaraan Desentralisasi.

| Derajat Desentralisasi (%) | Kemampuan Keuangan |
|----------------------------|--------------------|
|----------------------------|--------------------|

| | |
|--------|---------------|
| ≤10 | Sangat Kurang |
| >10-20 | Kurang |
| >20-30 | Cukup |
| >30-40 | Sedang |
| >40-50 | Baik |
| >50 | Sangat Baik |

Sumber : Jurnal (Sari, Asaari, & Hidayah, 2021)

2. Teknik analisis fishbone

Teknik Analisis Fishbone (Asmoko 2013) merupakan suatu alat visual untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan secara grafik menggambarkan secara detail semua penyebab yang berhubungan dengan suatu permasalahan. Dan secara umum, diagram fishbone digunakan pada tahap mengidentifikasi permasalahan dan menentukan penyebab munculnya permasalahan. Yang artinya teknik analisis fishbone adalah teknik analisis yang menguraikan tentang sebab akibat akar suatu masalah. Teknik analisis fishbone kemudian di gambarkan dalam Diagram Fishbone.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan penyelenggaraan pemerintahannya, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas bantuan pihak eksternal. Semakin rendah persentase rasio kemandirian keuangan suatu daerah maka semakin rendah kemampuan pemerintahannya dan semakin tinggi persentase keuangan pemerintah maka menunjukkan kemampuan keuangan daerah tersebut cukup baik.

Tabel 4. Hasil Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah

**Kabupaten Nias Selatan Periode Tahun
2019-2021.**
(Dalam Ribuan Rupiah)

| T. Anggaran | PAD | P. transfer | R. Kemandirian | keterangan |
|-------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------|
| 2019 | 25,664, 883,761 | 1,220,220,680,167 | 2 | Rendah Sekali |
| 2020 | 16,598, 894,146 | 1,359,300,377,218 | 1 | Rendah Sekali |
| 2021 | 32,822, 657,272 | 1,295,553,732,105 | 3 | Rendah Sekali |

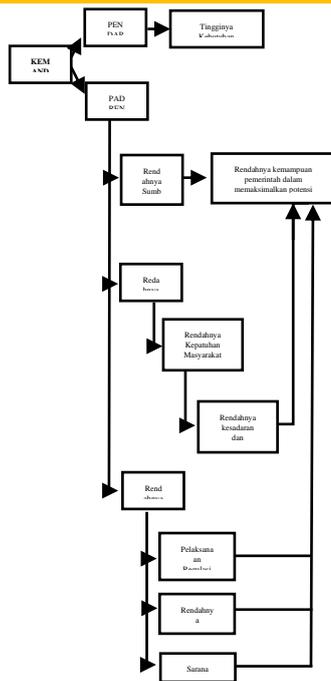
Sumber: LRAPBD Kabupaten Nias Selatan (Data Diolah) 2023

Tabel 4 diatas merupakan tabel hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten Nias Selatan pada periode tahun 2019-2021. Berdasarkan tabel diatas, tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan selama 3 tahun periode berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah termasuk dalam kemampuan yang tergolong rendah sekali. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Zuhri (Zuhri and Soleh 2014) yang menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Kaur berdasarkan rasio kemandirian, dapat disimpulkan bahwa kemampuan keuangan daerah kabupaten Nias Selatan berdasarkan rasio kemandirian keuangan menggambarkan tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal masih sangat tinggi. Hal ini disebabkan karena pengelolaan PAD Kabupaten Nias Selatan masih sangat rendah dilihat berdasarkan persentase yang terjadi pada tahun 2020, menunjukkan menurunnya realisasi PAD kabupaten Nias Selatan akibat dampak penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar guna mengurangi penyebaran covid-19 yang

mempengaruhi berbagai sektor pendapatan Nias Selatan terutama pada sektor pariwisata. Berdasarkan analisis diatas, dapat di simpulkan bahwa rendahnya PAD kabupaten Nias Selatan disebabkan karena sektor yang paling berkontribusi terhadap pendapatan Kabupaten Nias Selatan adalah sektor pariwisata dan kebudayaan dibandingkan dengan sektor pertanian, kelautan dan perikanan. Sehingga dari uraian diatas, menggambarkan masih rendahnya kemampuan pemerintah dalam memaksimalkan potensi sektor-sektor lain selain pariwisata. Selain itu, menurut (Orocomna, Bharanti, and Layuk 2015) dalam penelitiannya, mengemukakan bahwa tingkat kemandirian keuangan pemerintah ikut di pengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah. berikut adalah tingkat kontribusi pajak dan retribusi terhadap PAD kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan berdasarkan rasio kemandirian dapat di gambarkan dalam Diagram Fishbone berikut.

**Gambar 1. Diagram Analisis Fishbone
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**



Sumber: Desain Peneliti, 2023

2. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas adalah rasio yang menggambarkan tingkat pencapaian realisasi PAD atas anggaran PAD yang direncanakan oleh suatu daerah dalam periode tertentu. Semakin tinggi persentase rasio efektivitas PAD suatu daerah maka menunjukkan kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan potensi-potensi PAD sangat baik, dan sebaliknya jika persentase rasio efektivitas PAD daerah rendah maka menunjukkan kemampuan pemerintah daerah masih sangat rendah dalam memaksimalkan potensi-potensi PAD suatu daerah.

Tingkat rasio efektivitas PAD kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Hasil perhitungan tingkat rasio efektivitas PAD pemerintah daerah

kabupaten Nias Selatan periode tahun 2019-2021.

| Tahun | Rasio | | | |
|-------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | Anggaran PAD | Realisasi PAD | Efektivitas | keterangan |
| 2019 | 25,898,890,8 | 25,664,883,7 | 61 99 | Efektif |
| 2020 | 18,779,236,3 | 16,598,894,1 | 46 88 | Cukup Efektif |
| 2021 | 63,056,696,9 | 32,822,657,2 | 72 52 | Tidak Efektif |

Sumber: LRAPBD Kabupaten Nias Selatan (Data diolah) 2023

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah daerah berdasarkan rasio efektivitas PAD menunjukkan penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2021. Pada tahun 2019, rasio efektivitas PAD mencapai persentase 99% dengan anggaran sebesar Rp. 25.898.830,00 dan realisasi sebesar Rp. 25.664.883.761,00, sehingga tergolong efektif yang artinya pada tahun 2019, Pemerintah mampu mengoptimalkan potensi-potensi PAD sehingga realisasi PAD sangat tinggi.

Namun pada tahun 2020, tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah mengalami penurunan pada tingkat rasio efektivitas yang hanya mencapai persentase 88% dengan anggaran sebesar Rp. 18.779.236.300,00 dan realisasi PAD sebesar Rp. 16.598.894.146,00 sehingga tingkat kinerja keuangannya tergolong cukup efektif. Hal ini disebabkan karena menurunnya PAD daerah akibat dari kebijakan pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengakibatkannya menurunnya kegiatan perekonomian Nias Selatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan realisasi PAD pada tahun 2020 disebabkan karena kurangnya alternatif solusi atau kebijakan Pemerintah dalam menangani masalah ekonomi.

Dan pada tahun 2021, tingkat kinerja keuangan pemerintah kembali menurun secara signifikan yaitu dengan persentase rasio efektivitas hanya mencapai 52% dan tergolong tidak efektif, kurang optimalnya kinerja pengelolaan potensi PAD Nias Selatan oleh pemerintah dengan realisasi pendapatan pajak daerah hanya mencapai 73%, retribusi sebesar 37% hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan hanya mencapai 31% dan lain-lain PAD yang sah hanya mencapai 56%, hal ini mengindikasikan bahwa kinerja pengelolaan potensi PAD Nias Selatan oleh pemerintah masih sangat untuk di perhatikan.

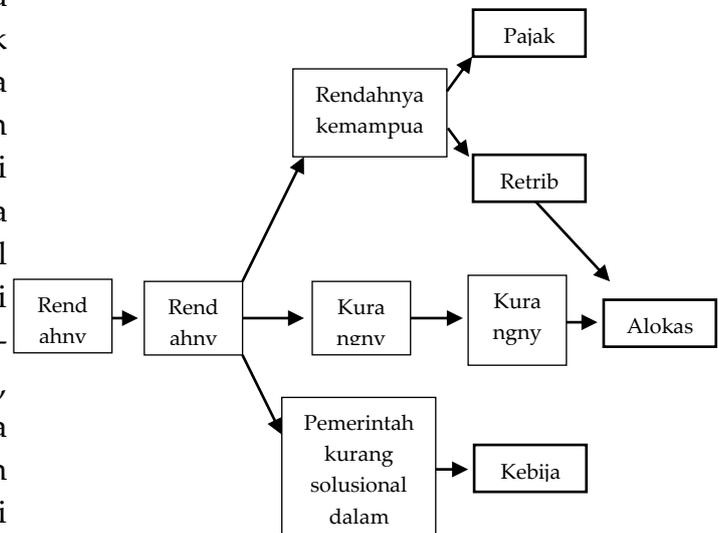
Berdasarkan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan dilihat berdasarkan tingkat efektivitas PAD menunjukkan kemampuan yang cukup rendah. Rendahnya efektivitas PAD kabupaten Nias Selatan di sebabkan karena kurangnya kemampuan Pemerintah

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Belanja | 954,075,863,964 | 1,062,706,223,259 | 1,411,390,331,215 |
| Belanja Operasional | 715,097,520,644 | 758,621,583,494 | 687,216,771,816 |
| Rasio Belanja Operasional | 74.95% | 71.38% | 48.69% |

daerah dalam merencanakan dan menggali potensi-potensi PAD yang ada dan kurangnya alternatif solusi Pemerintah untuk menangani krisis ekonomi serta rendahnya kemampuan pemerintah untuk melibatkan partisipasi swasta (investor) dalam mendorong perekonomian kabupaten Nias Selatan.

Selain itu, dalam penelitian Berdasarkan analisis rasio efektivitas PAD pemerintah di atas dapat di gambarkan Diagram Fishbone berikut:

Gambar 2
Diagram Analisis Fishbone Rasio Efektifitas PAD



Sumber: Desain Peneliti, 2023

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara belanja modal dan belanja operaional, dan menentukan arah penggunaan belanja pemerintah suatu daerah.

Tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio aktivitas dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6
Hasil perhitungan rasio aktivitas keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan periode tahun 2019-2021.

| Uraian | 2019 | 2020 | 2021 |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Belanja | 954,075,863,964 | 1,062,706,223,259 | 1,411,390,331,215 |
| Belanja Modal | 238,978,343,319 | 293,434,523,125 | 245,107,576,769 |
| Rasio Belanja Modal | 25.04% | 27.61% | 17.36% |

Sumber: LRAPBD (Data Diolah) 2023

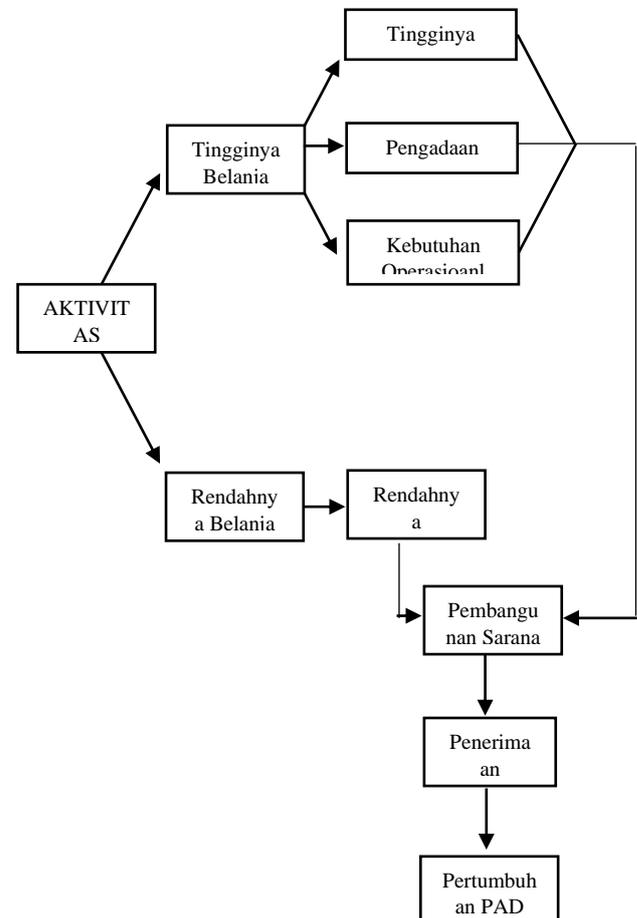
Pada tabel 6 menunjukkan tingkat kinerja keuangan pemerintah berdasarkan rasio aktivitas keuangan daerah selama 3 tahun periode. Pada tahun 2019, pemerintah daerah mengalokasikan keuangan belanja daerah 75% untuk belanja operasional dan 25% untuk belanja modal, yang mengindikasikan rendahnya pembangunan fisik daerah pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, kinerja keuangan pemerintah pada belanja operasional mengalami penurunan dari tahun 2019 yaitu dengan alokasi sebesar 71% dan peningkatan pada belanja modal yaitu dengan alokasi belanja sebesar 28%. Dan pada tahun 2021, persentase belanja operasional dan belanja modal mengalami penurunan yaitu 49% untuk belanja operasional dan 17% untuk belanja modal. Sehingga dapat diketahui bahwa persentase belanja operasional lebih besar dibandingkan dengan belanja modal pemerintah daerah selama 3 tahun periode. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh (Zuhri and Soleh 2014), saat alokasi belanja pemerintah daerah lebih besar ke arah belanja operasional di bandingkan belanja modal maka menunjukkan bahwa pemerintah kabupaten Nias Selatan lebih condong pada pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, hal ini disebabkan karena tingginya aktivitas operasional pemerintah terutama karena tingginya pembiayaan pemerintah atas gaji pegawai pemerintah daerah, serta kebutuhan pemerintah atas pembelian barang dan jasa operasional cukup tinggi serta pengadaan *event-event* daerah

| Rasio Aktivitas | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------|--------|--------|--------|
| Belanja Operasi | 74.95% | 71.38% | 48.69% |
| Belanja Modal | 25.04% | 27,61% | 17.36% |

sehingga menyebabkan rendahnya tingkat pembangunan sarana prasarana dan pembangunan fisik daerah yang berdampak pada pertumbuhan PAD kabupaten Nias Selatan.

Berdasarkan analisis rasio aktivitas di atas dapat di gambarkan dalam Diagram Fishbone berikut:

Gambar 3. Diagram Analisis Fishbone Rasio Aktivitas



Sumber: Desain Peneliti, 2023

4. Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio derajat desentralisasi adalah rasio yang menggambarkan dan menjelaskan tingkat kontribusi PAD terhadap penyelenggaraan desentralisasi. Semakin tinggi persentase rasio derajat desentralisasi maka

menunjukkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan desentralisasinya.

Tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan periode tahun 2019-2021 berdasarkan rasio derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan.

| Tahun anggaran | PAD | Total Pendapatan | Rasio DD | keterangan |
|----------------|----------------|-------------------|----------|---------------|
| 2019 | 25,664,883,761 | 1,311,187,399,570 | 2 | Sangat Kurang |
| 2020 | 16,598,894,146 | 1,459,778,561,445 | 1 | Sangat Kurang |
| 2021 | 32,822,657,272 | 1,401,145,250,515 | 2 | Sangat Kurang |

Sumber : LRAPBD (Data Diolah)2023

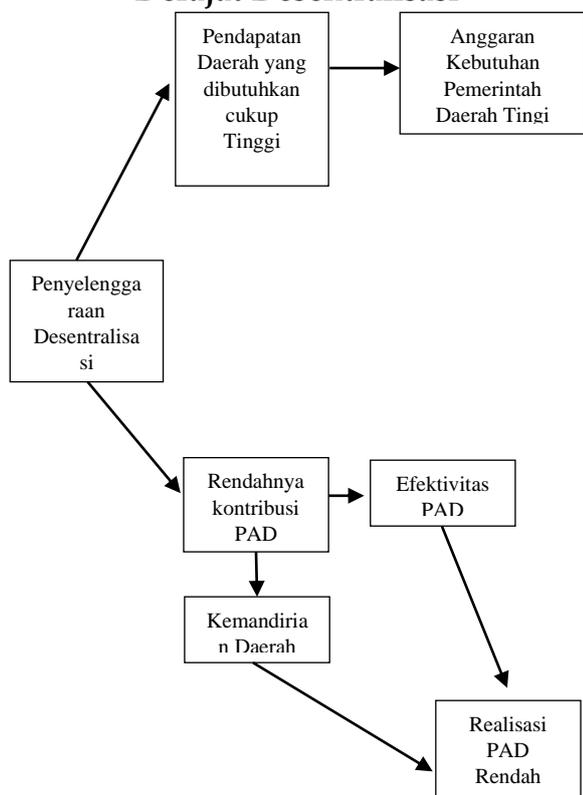
Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan rasio derajat desentralisasi keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan selama 3 tahun periode menunjukkan kemampuan keuangan yang masih tergolong sangat kurang mampu. Pada tahun 2019, jumlah penerimaan PAD daerah hanya sebesar Rp. 25.664.883.761,00 dibandingkan dengan total pendapatan sebesar Rp. 1.311.187.399.570,00 dengan kemampuan keuangan yang masih tergolong sangat kurang. Selanjutnya pada tahun 2020, kinerja keuangan pemerintah mengalami penurunan karena menurunnya pendapatan PAD daerah yaitu dengan penerimaan sebesar Rp. 16.598.894.146,00 dan dengan total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.459.778.561.445,00. Kemudian pada tahun 2021, tingkat kinerja keuangan pemerintah mengalami

peningkatan yaitu dengan PAD sebesar Rp. 32.822.657.272,00 dan total pendapatan daerah sebesar Rp. 1.401.145.250.515,00. Berdasarkan hasil analisis rasio di atas, kemampuan keuangan pemerintah daerah selama 3 tahun periode menunjukkan kinerja keuangan yang masih tergolong sangat rendah, hal ini disebabkan karena tingkat kontribusi PAD terhadap penyelenggaraan desentralisasi sangat rendah. Sejalan dengan analisis rasio-rasio sebelumnya, menunjukkan tingkat efektivitas PAD dan tingkat potensi realisasi penerimaan PAD yang masih sangat rendah, dapat menjelaskan tingkat kontribusi atau kinerja keuangan Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Desentralisasi, sehingga Pemerintah daerah sangat diharapkan untuk melakukan pembenahan terutama pada upaya peningkatan pertumbuhan PAD dan memperhatikan alokasi belanja pemerintah.

Berdasarkan analisis rasio Penyelenggaraan Desentralisasi diatas, dapat digambarkan dalam Diagram Analisis Fishbone.

Gambar 4

Diagram Analisis Fishbone rasio Derajat Desentralisasi



Sumber: Desain Peneliti, 2023

D. Penutup

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan periode tahun 2019-2021, dapat disimpulkan bahwa tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan menunjukkan tingkat rata-rata kinerja yang tergolong masih sangat rendah. Hal ini disebabkan karena penerimaan daerah dari PAD sangat rendah akibat dari rendahnya kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan memaksimalkan potensi PAD, kurangnya ketertarikan para investor untuk berinvestasi di kabupaten Nias Selatan, dan alokasi belanja operasional lebih tinggi dibandingkan belanja modal daerah sehingga mempengaruhi kinerja penyelenggaraan pemerintahan oleh

pemerintah daerah kabupaten Nias Selatan pada periode tahun 2019-2021.

Saran

Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan diatas, peneliti menyarankan:

1. Pemerintah perlu meningkatkan kinerja keuangannya terutama pada pengelolaan PAD terutama dalam memaksimalkan potensi-potensi PAD sehingga mengurangi tingkat ketergantungan Pemerintah daerah atas bantuan pusat dan meningkatkan kemampuan PAD dalam berkontribusi dalam penyelenggaraan Desentralisasi,
2. Pemerintah perlu meningkatkan dan memperhatikan kesadaran pajak masyarakat, dan meningkatkan pelayanannya dalam upaya sosialisasi pajak ke masyarakat. Serta Pemerintah juga perlu meningkatkan ketersediaan sarana prasarana guna meningkatkan realisasi penerimaan retribusi daerah kabupaten Nias Selatan
3. Pemerintah perlu menarik dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak investor guna mendorong perekonomian kabupaten Nias Selatan.
4. Pemerintah harus lebih memperhatikan pengalokasian belanja daerah terutama pada belanja modal guna meningkat aset daerah terutama sarana prasarana dan fasilitas sebagai wujud tujuan kebijakan otonomi.
5. Pemerintah harus lebih solusional dalam menetapkan kebijakan dan menyelesaikan masalah ekonomi yang di hadapi daerah.

E. Daftar Pustaka

- Asmoko, Hindri. 2013. "Teknik Ilustrasi Masalah – Fishbone Diagrams." : 1–8.
- Anis Sumanti Manao. (2022). Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja Terhadap Motivasi Kerja Pegawai

- Pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias Selatan. Vol 5 Dian Kasih Bago (2022). No 1 (2022) Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, Dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Nias Selatan
- Aris Putra Laia. 2022. Makna Famesao Ono Nihalö Pada Acara Pernikahan Di Desa Simandraölö Kecamatan O'o'u *FAGURU : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Keguruan Universitas Nias Raya (UNIRAYA)*, 1 (1), 28-41
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Fau, A. D. (2022a). Budidaya Bibit Tanaman Rosela (Hibiscus Sabdariffa) Dengan Menggunakan Pupuk Organik Gebagro 77. *Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi*, 3(2), 10–18. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/Tunas/article/view/545>
- Fau, A. D. (2022b). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fahmi, Irham. 2017. *Analisis Kinerja Keuangan*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Faisal, and Akmal Huda Nasution. 2016. "Otonomi Daerah: Masalah Dan Penyelesaiannya Di Indonesia." 4(2): 206–15.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. "Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul." (32): 33–48.
- Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Sektor Publik Keuangan Daerah*. Revisi. Jakarta: Salemba Empat.
- — —. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Akuntansi Keuangan Daerah*. 4th ed. Jakarta: Salemba Empat.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, D. (2017). Pengaruh Presepsi Siswa Mengenai Kompetensi Pedagogik Guru Dan Minatbelajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Ilmu Pengetahuan Alam (Survey pada SMK Swasta di Wilayah Jakarta Utara). *Horison Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Lingusitik*, 7(2), 49–73.
- Harefa, D. (2018). Efektifitas Metode Fisika Gasing Terhadap Hasil belajar Fisika Ditinjau dari Atensi Siswa (Eksperimen Pada Siswa Kelas VII SMP Gita Kirtti 2 Jakarta). *Faktor Jurnal Ilmiah Kependidikan* 5 (1), 35-48.
- Harefa, D. (2020a). Belajar Fisika Dasar Untuk Guru, Mahasiswa dan

- Pelajar. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D. (2020b). Differences In Improving Student Physical Learning Outcomes Using Think Talk Write Learning Model With Time Token Learning Model. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D. (2020c). Pengaruh Antara Motivasi Kerja Guru IPA dan Displin Terhadap Prestasi Kerja. *Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 6(3), 225–240.
- Harefa, D. (2020c). Teori Ilmu Kealaman Dasar Kajian Untuk Mahasiswa Pendidikan Guru dan Akademis. Penerbit Deepublish. Cv Budi Utama.
- Harefa, D. (2020d). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Solving Terhadap Hasil Belajar IPA Fisika Siswa Kelas IX SMP Negeri 1 Luahagundre Maniamolo Tahun Pembelajaran (Pada Materi Energi Dan Daya Listrik). *Jurnal Education and Development*, 8(1), 231–234.
- Harefa, D. (2020f). Peningkatan Hasil Belajar Siswa Dengan Pembelajaran Kooperatif Make A Match Pada Aplikasi Jarak Dan Perpindahan. *GEOGRAPHY : Jurnal Kajian, Penelitian Dan Pengembangan Pendidikan*, 8(1), 1–8.
<https://doi.org/https://doi.org/10.31764/geography.v8i1.2253>
- Harefa, D. (2020g). Peningkatan Prestasi Rasa Percaya Diri Dan Motivasi Terhadap Kinerja Guru IPA. *Media Bina Ilmiah*, 13(10), 1773–1786.
<https://doi.org/https://doi.org/10.33758/mbi.v13i10.592>
- Harefa, D. (2020h). Peningkatan Strategi Hasil Belajar IPA Fisika Pada Proses Pembelajaran Team Gateway. *Jurnal Ilmiah Aquinas*, 3(2), 161–186.
- Harefa, D. (2020i). Perbedaan Peningkatan Hasil Belajar Fisika Siswa Menggunakan Model Pembelajaran Think Talk Write Dengan Model Pembelajaran Time Token. *Jurnal Inovasi Pendidikan Dan Sains*, 1(2), 35–40.
- Harefa, D. (2020k). Perbedaan Hasil Belajar Fisika Melalui Model Pembelajaran Problem Posing Dan Problem Solving Pada Siswa Kelas X-MIA SMA Swasta Kampus Telukdalam. *Prosiding Seminar Nasional Sains 2020*, 103–116.
- Harefa, D. (2021). Monograf Penggunaan Model Pembelajaran Meaningful Instructional design dalam pembelajaran fisika. CV. Insan Cendekia Mandiri.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=RTogEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=gmZ8djJHZu&sig=JKoLHfCIJf6V29EtTToJCrvmnI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

- Harefa, D. (2022). EDUKASI PEMBUATAN BOOKCAPTHER PENGALAMAN OBSERVASI DI SMP NEGERI 2 TOMA. Haga Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2).
- Harefa, D. (2023). Efektivitas Model Pembelajaran Talking Chips Untuk. Tunas: Jurnal Pendidikan Biologi, 4(1).
- Harefa, D., D. (2020). Teori Model Pembelajaran Bahasa Inggris dalam Sains. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, D., D. (2022). Kewirausahaan. CV. Mitra Cendekia Media.
- Harefa, D., Hulu, F. (2020). Demokrasi Pancasila di era kemajemukan. CV. Embrio Publisher,.
- Harefa, D., Telambanua, K. (2020). Teori manajemen bimbingan dan konseling. CV. Embrio Publisher.
- Harefa, D., Telaumbanua, T. (2020). Belajar Berpikir dan Bertindak Secara Praktis Dalam Dunia Pendidikan kajian untuk Akademis. CV. Insan Cendekia Mandiri.
- Harefa, Darmawan., D. (2023b). Teori Fisika. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-fisika-A1UFL.html>
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Yoga Yogyakarta.
- Moonti, Roy Marthen. 2017. "Hakikat Otonomi Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia." 19(2): 26–37.
- Orocomna, Manasep, B. Elita Bharanti, and Paulus K. Allo Layuk. 2015. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015." 2(3): 1–17.
- Putra, Windhyu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Makasar: De La Macca.
- Sari, Imelda, Masagus Asaari, and Ika Sefty Nurul Hidayah. 2021. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010-2019." : 408–25.
- Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Ulum, Ihyaul. 2012. *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Media Aksara.
- Wau, Marselino, Leni Wati, and Jhon Firman Fau. 2022. *Teori Pertumbuhan Ekonomi (Kajian Konseptual Dan Empirik)*. Purbalingga: EUREKA MEDIA AKSARA.
- Zuhri, Muhammad, and Ahmad Soleh. 2014. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur." : 187–95.
- Zukhri, Nizwan. 2020. "Indonesian Treasury Review." 5(2020): 143–49.